

SKRIPSI



TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERDA NO.2 TAHUN 2008 TENTANG LARANGAN UNTUK MENGEMIS DAN BERGELANDANGAN

DI KOTA MAKASSAR

**OLEH :
TRY FANDY NASIR
B 111 11 115**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

ABSTRAK

TRY FANDY NASIR (B 111 11 115), Judul Skripsi :

Tinjauan Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2008 tentang Larangan Mengemis dan Bergelandangan di Kota Makassar, (dibimbing oleh H.Said Karim sebagai pembimbing I dan Hj. Nur Azisa sebagai pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah mengenai larangan untuk mengemis dan bergelandangan di kota Makassar serta peran dari pihak Kepolisian dalam menangani hal tersebut. Di kota Makassar terdapat Perda No 2 Tahun 2008 yang mengatur Tentang Larangan untuk Mengemis dan Bergelandangan di Kota Makassar serta Perda yang mengatur Tentang Pembinaan Anak Jalanan, gelandangan dan Pengemis Di Kota Makassar yang dapat menjadi salah satu dasar hukum dalam menangani pengemis dan gelandangan yang tersebar di kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat di kota Makassar, yaitu di Dinas Sosial Kota Makassar, Satpol PP , Sekta IV dan beberapa tempat yang biasa dijadikan tempat mengemis dan bergelandangan. Banyaknya anak yang menjadi pengemis di kota Makassar disebabkan oleh banyak faktor.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa Perda No.2 Tahun 2008 tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan di Kota Makassar sudah efektif dengan terlaksananya patroli yang dilakukan oleh Satpol PP dengan *back-up* an dari pihak Kepolisian. Keefektivan dari Perda tersebut juga dapat dilihat dari penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Polri dengan cara Patroli dan Rasia lalu dilakukan pendataan yang kemudian akan diberi pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa pengembangan diri sesuai bakat dan keinginannya masing-masing sehingga pengemis dan gelandangan yang ada di kota Makassar dapat mengembangkan bakatnya untuk mencari penghasilan tanpa mengemis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan terutama nikmat umur dan kesehatan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2008 tentang Larangan Mengemis Dan Bergelandangan Di Kota Makassar*" sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa Shalawat dan salam terhaturkan untuk Sang Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **AIPTU Muh. Nasir Abbas** dan Ibunda **Nurdiana Nawir S.S.,M.Si** dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada Penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian Penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan Doa dan dukungannya.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, maka izinkanlah Penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian hingga penulisan Skripsi ini:

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini menemui banyak kendala dan hambatan, untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.** selaku Pembimbing I (satu) dan **Hj. Nur Azisa,S.H.,M.H.** selaku Pembimbing II (dua) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama penulisan Skripsi. Dan terima kasih kepada para pihak yang ikut membantu dan terus memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

1. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Farida,SH.,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, beserta para Wakil Dekan **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,** atas berbagai bantuan yang diberikan kepada Penulis, baik bantuan untuk menunjang berbagai kegiatan individual maupun yang dilaksanakan oleh Penulis bersama organisasi lain di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., M.si., Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.** dan **Hj. Haeranah, S.H., M.H.** selaku Dewan penguji yang telah memberikan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Terima kasih kepada Ketua Bagian Hukum Pidana **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S** dan Sekretaris Bagian **Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H** dan Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah menuangkan ilmu kepada Penulis sejak kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar sampai sekarang.
5. Terima kasih Kepada Seluruh staff akademik dan perpustakaan FH-UH khususnya kepada **Pak Usman, kak Tri** dan **Pak Ramlan** atas segala bantuannya selama Penulis berkuliah di FH-UH.
6. Terima kasih kepada saudara-saudari penulis **Fatimah Rezkyana Nasir, Fachry Setiawan Nasir** dan **Farahdiba Aulia Nasir** yang memberikan dorongan dan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan studi ini.
7. Orang-orang terkasih dan tersayang penulis **Fitriah Karmita , Aidah Aabidah, Zhafirah Zhafarina, Ratu Hardiyanti, Nadya Ansyari, Yuniar Afifah, Eka Pratiwi, lin Nurfadilah, Mya S, Nurul Fadilah Natasya, Dwi Nur Widya , Nesya Diana ,Vika velika, Desy Vijayanti, Aninda, Sofia AM Tahir, Sitti Fauziah Ahmad, Fauziah Fania, Ai, Alifrubi Ma'bud, Ivander, Gufran, Fahmy Nur Faisal, Fadhil Wiguna, Tri Restutianto, Fahmy Siddiq, Aditya, Sultan Mubarak dan Nurul Namirah K** yang selalu memberikan canda dan tawa ketika penulis mulai jenuh, senantiasa menjadi

pendengar yang baik akan keluh kesah dan suka duka yang penulis rasakan, serta selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan yang ikhlas kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman seperjuangan **PASKIB SMUNEL** atas doa dan semangat yang di berikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat **THE MACZ MAN RASTA** yang sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri. Terima kasih atas berbagi pengalamannya selama ini dan yang selalu setia menemani dan memberikan bantuan serta dorongan kepada penulis.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Selama di Fakultas Hukum, **Zakaria, Ichwan Setiawan, Muh Muallif Heru W, Muhammad Fadhil Putra Rusli, Muh Abdillah Fadlyansyah, Muh Febriansyah, Zainal Arief, A Arie Veriansyah, Aldi Rinaldi, Asfar Amien, Irfan Nur hadi, Zulham Syahrir, Agung Hidayat, Nidzamul Nadvi, Eduard Batara, Reny asyhari, Dwi Putri Maharti** selamat berjuang dan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya selama ini.
11. Kepada teman-teman **Mediasi** angkatan 2011, selamat berjuang dan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya selama ini.
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (**GARDA TIPIKOR**) Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin yang telah menjadi teman baik dan memberikan banyak pelajaran hidup kepada Penulis.

13. Terima Kasih Kepada Teman KKN Gelombang 87 UNHAS khususnya Kab. Bone, Kec. Mare, Desa/Kelurahan Mattampa walie. Terima kasih atas pengalaman baru yang diberikan selama KKN.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Makassar, April 2015

Try Fandy Nasir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuatan Mengikat Undang-Undang	6
1. Pengertian Undang-Undang	6
2. Kekuatan Berlakunya Undang-Undang	8
3. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Menurut Waktu	9
4. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Menurut Tempat dan Orang	10
B. Efektivitas Hukum	11
1. Kesadaran Hukum	13
2. Ketaatan Hukum	19
C. Gelandangan dan Pengemis	19
1. Gelandangan	19
2. Pengemis	21
D. Tindak Pidana	23
1. Perintah (Delik Komisi)	23
2. Larangan (Delik Omisi)	23
3. Kejahatan	24
4. Pelanggaran	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	50
B. Jenis dan Sumber Data	50

C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Umum Kota Makassar	54
B. Data mengenai Pengemis dan Gelandangan	57
C. Keefektivan Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2008 tentang larangan mengemis dan bergelandangan di kota Makassar	65
D. Peran Pihak Kepolisian dalam menangani pengemis dan gelandangan	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	xii

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini semakin sering kita menjumpai banyaknya gelandangan, pengemis, maupun pekerja anak yang berada dibawah kota, fasilitas-fasilitas umum, *traffic light* bahkan hingga masuk pada wilayah kampus dan pemukiman warga. Tampaknya gelandangan dan pengemis tetap menjadi masalah dari tahun ke tahun, baik bagi wilayah penerima(perkotaan) maupun bagi wilayah pengirim(pedesaan) walaupun telah diusahakan penganggulungannya secara terpadu di wilayah penerima dan pengirim. Setiap saat pasti ada sejumlah gepeng yang kena razia dan dikembalikan ke daerah asal setelah melalui pembinaan. (Saptono Iqbal, 2007)

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunya tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis adalah seorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis di muka umum. (N.F Kesumawindayati, C. Sahuri, 2011)

Sedangkan menurut peraturan pemerintah No.31 Tahun 1980, orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan dengan mengharapkan belas kasihan dari orang lain disebut dengan pengemis(Perda Kota Makassar, 2009).

Masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya terutama di Kota Makassar. Secara fisik, pengemis juga berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya tetapi sesungguhnya mereka terisolasi karena tidak bisa mencapai fasilitas yang ada. Banyak orang yang sebenarnya masih dalam keadaan sehat memilih untuk mengemis/meminta-minta, hal ini dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, masalah urbanisasi serta masalah kecacatan. Karena kondisi tersebutlah, maka praktek dalam mengemis dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.(Perda Kota Makassar, 2009)

Kota Makassar merupakan kota terbesar ke empat di Indonesia dan terbesar di kawasan timur Indonesia yang memiliki luas areal 175,79 km² dengan penduduk 1.112.688 orang, sehingga kota ini sudah menjadi kota metropolitan, dari jumlah penduduk di kota Makassar terdapat 0,03% pengemis dan gelandangan yang terdapat pada data dalam katalog Badan Pusat Statistik kota Makassar tahun 2006 yang menyatakan bahwa jumlah gelandangan dan pengemis dari tahun ke tahun menurun,

yaitu pada tahun 2004 berjumlah 386 orang gelandangan dan pengemis lalu pada tahun 2005 menurun hingga 345 orang gelandangan dan pengemis dan pada tahun 2006 tetap dengan jumlah 345 orang gelandangan dan pengemis. (Katalog BPS Kota Makassar, 2007)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis juga menegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam penanganan pengemis, larangan untuk mengemis maupun menggelandang telah diatur di dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti dibawah ini,(Solahuddin, 2008:8)

Pasal 504 KUHP

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP

- (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Adapun larangan untuk mengemis dan bergelandangan khususnya di kota makassar diatur dalam Perda No.2 Tahun 2008, yaitu :

Pasal 46

Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, atau menggelandang di tempat umum.

Pasal 47

(1) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan aktifitas mengamen di jalanan, kecuali tempat umum yang direkomendasikan oleh Walikota;

(2) Pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah mereka yang memiliki kartu anggota sebagai pengamen.

Pasal 48

(1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum;

(2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengumpulkan dana yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan di tempat umum, kecuali yang telah memperoleh izin dan rekomendasi dari Pemerintah Kota Makassar berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Barang dan Jasa.

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2008 tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan di kota Makassar ?

2. Bagaimanakah peranan pihak kepolisian terhadap Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2008 tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan di kota Makassar ?

G. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2008 tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui peranan pihak kepolisian terhadap Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2008 tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan di kota Makassar ?

H. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.
2. Sebagai suatu karya yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

E. Kekuatan Mengikat Undang-Undang

1. Pengertian Undang-Undang

Undang-Undang dibedakan menjadi dua, yaitu Undang-Undang dalam arti materil dan Undang-Undang dalam arti formil. (L.J Van Apeldoorn, 1978:92) Hal ini merupakan terjemahan secara harfiah dari "*wet in formele zin*" dan "*wet materiële zin*" yang dikenal di Belanda. Yang dinamakan undang-undang dalam arti materil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Undang-Undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang disebut dengan undang-undang dilihat dari cara pembentukannya. Bandingkan dengan pendapat dari ahli hukum Paul Laband: "*Das Staatsrecht des deutschen Reiches*" (1911) (E, Utrecht, 1961:80).

Undang-Undang bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk lembaga legislatif. Pada umumnya Undang-Undang terdiri dari dua bagian, yaitu konsederans atau pertimbangan yang berisi pertimbangan-pertimbangan mengapa Undang-Undang itu dibuat, dan diktum atau amar. Di dalam amar terdapat isi dari Undang-Undang yaitu yang kita sebut pasal-pasal.

Selain dua bagian tersebut ada bagian lain yang juga penting keberadaannya, yaitu ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan mempunyai fungsi penting, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena ada kemungkinannya suatu Undang-Undang baru tidak mengatur semua hal atau peristiwa yang diatur oleh Undang-Undang yang lama. Kalau terjadi suatu peristiwa yang diatur dalam Undang-Undang yang lama tetapi tidak diatur dalam Undang-Undang yang baru maka disinilah peranan ketentuan peralihan. Biasanya bunyi dari ketentuan peralihan yaitu: “*apabila tidak ada ketentuannya, makaberlakukan peraturan yang lama*”.

Undang-Undang adalah hukum(Sudikno Mertokusumo, 1999:87). Hal ini karena Undang-Undang berisi kaedah hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang dianggap tahu akan adanya suatu Undang-Undang. Pernyataan ini merupakan *fictie* karena kenyataannya tidak setiap orang dapat mengetahui setiap Undang-Undang yang diundangkan hal ini karena ketidaktahuan seseorang bukanlah termasuk dasar pemaaf, sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 645K/Sip/1970.

Agar dapat diketahui setiap orang, maka Undang-Undang harus diundangkan atau diumumkan dengan memuatnya dalam lembaran negara. Dengan dimuatnya dalam lembaran negara maka peraturan perundang-undang tersebut mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1AB): mengikat setiap orang untuk mengetahui eksistensinya.

2. Kekuatan Berlakunya Undang-Undang

Kekuatan berlakunya Undang-Undang ini tidak sama dengan kekuatan mengikatnya Undang-Undang. Undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya di dalam lembaran negara. Ini berarti sejak dimuatnya dalam lembaran negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Kekuatan berlakunya Undang-Undang menyangkut berlakunya Undang-Undang secara operasional. Undang-Undang mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis(Sudikno Mertokusumo, 1999:87).

1. Kekuatan Berlaku Yuridis (*Juristische Geltung*) Undang-Undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis jika persyaratan formal terbentuknya Undang-Undang terpenuhi. Kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum merupakan sistem kaedah secara *hierarchies*. Di dalam *Grundnorm* (norma dasar) terdapat dasar berlakunya semua kaedah yang berasal dari satu tata hukum. Dari *Grundnorm* ini hanya dapat dijabarkan berlakunya kaedah hukum dan bukan isinya. Pertanyaan mengenai berlakunya itu berhubungan dengan *das Sollen*, sedangkan *das Sein* itu berhubungan dengan pengertian hukum. Bandingkan dengan pendapat Hans Kelsen.
2. Kekuatan Berlakunya Sosiologis (*Soziologische Geltung*) Berlaku atau diterimanya hukum di dalam masyarakat didasarkan pada kenyataan

dalam masyarakat(Sudikno Mertokusumo, 1999:88). Kekuatan berlakunya hukum di dalam masyarakat ini ada dua macam, yaitu:

- a. menurut teori kekuatan (*Machtstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila keberlakuannya dipaksa oleh penguasa, terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat,
- b. menurut teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.

3. Kekuatan Berlaku Filosofis (*Filosofische Geltung*) Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis jika kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi (dalam hal ini harus sesuai dengan tujuan dari Pancasila yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur). (Sudikno Mertokusumo, 1999:88)

3. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Menurut Waktu

Pada dasarnya undang-undang hanya mengatur perilaku atau peristiwa yang terjadi sesudah undang-undang diundangkan dan tidak sebaliknya. Jika tidak demikian maka kepastian hukum tidak akan terjamin. Asas bahwa Undang-Undang tidak berlaku surut diatur dalam Pasal 2 AB: *Undang-Undang hanyamengikat untuk waktu yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan berlakusurut.*

- **Saat Dimulai Berlakunya dan Berakhirnya Undang-Undang.**

Menurut Pasal 50 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kalau tidak ditentukan tanggalnya, maka Undang-Undang itu mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah hari diundangan (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, Lembaran Negara Nomor 32). Mulai berlakunya Undang-Undang dapat juga ditentukan dalam Undang-Undang itu sendiri, yaitu:

- a. pada saat diundangkan, (misalnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini, yaitu diatur dalam Pasal 74),
- b. pada tanggal tertentu,
- c. ditentukan berlaku surut,
- d. bahwa berlakunya akan ditentukan kemudian atau dengan peraturan lain.

Undang-Undang berakhir karena:

- a. ditentukan dalam Undang-Undang itu sendiri,
- b. dicabut secara tegas,
- c. Undang-Undang lama bertentangan dengan Undang-Undang baru: *lex priori derogate legi priori*,
- d. timbulnya hukum kebiasaan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Undang-Undang tidak lagi ditaati.

4. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Menurut Tempat dan Orang

Mengenai ruang lingkup berlakunya Undang-Undang menurut tempat atau orang ada tiga kemungkinan:

1. *Asas territorial*, yaitu Undang-Undang berlaku bagi setiap orang dalam wilayah negara tanpa membedakan kewarganegaraan orang yang ada dalam wilayah negara tersebut. Jadi berlakunya Undang-Undang dibatasi oleh wilayah.
2. *Asas Personal*, yaitu Undang-Undang berlaku bagi orang yang ada, baik di dalam suatu wilayah negara maupun di luarnya. Di sini Undang-Undang mengikuti negara dan tidak terbatas pada wilayah negara saja.
3. *Asas Universal*, yaitu Undang-Undang berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan kejahatan tertentu. Berlakunya Undang-Undang di sini tidak terbatas pada wilayah Indonesia saja, tetapi juga tidak terbatas pada wilayah lain.

F. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 mengatur tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan di kota Makassar, yaitu sebagai berikut :

Pasal 46

Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, atau menggelandang di tempat umum.

Pasal 47

(1) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan aktifitas mengamen di jalanan, kecuali tempat umum yang direkomendasikan oleh Walikota;

(2) Pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah mereka yang memiliki kartu anggota sebagai pengamen.

Pasal 48

(1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum;

(2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengumpulkan dana yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan di tempat umum, kecuali yang telah memperoleh izin dan rekomendasi dari Pemerintah Kota Makassar berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Barang dan Jasa.

Adapun sanksi dari pasal-pasal diatas tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 51

(1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi gelandangan dan pengemis;

(2) Gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas pengemis usia produktif 18 – 59 tahun dan pengemis usia lanjut 60 tahun ke atas;

(3) Pembinaan bagi gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis dan/atau melakukan kegiatan ekonomi di tempat umum yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan;

(4) Setiap gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang ditemukan di tempat umum yang melakukan kegiatan mengemis akan dikenakan hukuman pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial selama 10 (sepuluh) hari;

(5) Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berupa :

a. pembinaan dan pengendalian dilakukan untuk menghalangi mereka agar tidak turun ketempat umum yang dilakukan oleh petugas;

b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya di rehabilitasi;

c. pengembalian dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang berasal dari daerah lain;

d. bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan

c kemudian selanjutnya masih didapati melakukan aktifitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(6) Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia lanjut sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berupa :

a. pembinaan dengan cara menghalangi mereka agar tidak turun ke tempat umum yang dilakukan oleh petugas;

b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan aktifitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya di rehabilitasi seumur hidup dalam sistem panti sosial (Panti jompo).

G. Efektivitas Hukum

Ketika kita ingin mngetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, 'sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak di taati'. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh

sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. (Achmad Ali, 2010:375)

Jika kita ingin mengkaji efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh **Gunnar Myrdall** sebagai *sweep legislation* (Undang-Undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Seseorang menaati ketentuan perundang-

undangan adalah karna terpenuhinya suatu kepentingannya (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut.

Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif :

- a. **Perspektif organisatoris**, yang memandang perundang-undangan sebagai 'institusi' yang ditinjau dari ciri-cirinya. Tidak terlalu memerhatikan pribadi-pribadi, yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.
- b. **Perspektif individu**, atau ketaatan, yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, di mana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Perspektif individu lebih dikenal sebagai ketaatan (obedience). Perspektif ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi. Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, **pola-pola perilaku warga masyarakat yang banyak memengaruhi efektivitas perundang-undangan.**
(Acmad Ali, 2010:378-380)

1. Kesadaran Hukum

a. Pengertian

1. Pengertian Kesadaran.

- a. Menurut Suharso dan Retnoningsih (2005: 366), "Kesadaran adalah keinsafan; keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang".

b. Menurut Nias (<http://niasonline.net/>), menyatakan bahwa dalam psikologi “kesadaran didefinisikan sebagai tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran”.

2. Pengertian Hukum.

a. Menurut Suharso dan Retnoningsih (2005: 171), menyatakan bahwa: “Hukum adalah peraturan yang di buat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak; undang-undang, ketentuan, kaedah, patokan; keputusan hakim.”

b. Hukum menurut Simorangkir dan Sastropranoto (Kansil, 1989: 38), hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

c. Hukum menurut Amin (Kansil, 1989: 38), hukum merupakan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-saksi.

3. Pengertian Kesadaran Hukum.

a. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu,

suatu kategori tertentu dari hidupkejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan (Satjipto R, 2009) .

b. Menurut kamus Bahasa Indonesia. Kesadaran hukum adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan.

c. Menurut Suharso dan Retnoningsih, (1993: 765), kesadaran hukum adalah Nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada. Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dalam Masyarakat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soekanto (Nurhidayat, 2006: 9-11), dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi.
3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Penghargaan atau sikap terhadap ketentuanketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
4. Petaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum,

dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekanrekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

c. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Tingkat Kesadaran Hukum menurut Soekanto (Nurhidayat, 2006: 11-12), indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa :

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum Seseorang pelajar mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman

yang benar dari pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan disekolah.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkat-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

2. Ketaatan Hukum

Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh aliran sosiologis menyangkut efektivitas suatu aturan hukum. Menurut aliran ini, sejauh mana efektivitas suatu instrumen hukum, termasuk di dalamnya hukum internasional maka harus diketahui lebih dahulu sejauh mana instrumen hukum itu ditaati. Ada 3 macam ketaatan menurut H.C Kelman, yaitu :

- a. ***Compliance***, ketaatan yang hanya takut sanksi, yang mana derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.

- b. **Identification**, yaitu jika subyek hukum menaati suatu aturan karena kekhawatiran hubungan baiknya dengan pihak lain akan rusak atau terganggu jika ia tidak menaati aturan tersebut;
- c. **Internalization**, ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi (Achmad Ali, 2010:375)

C. Gelandangan dan Pengemis

3. Gelandangan

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum.

Mengutip pendapatnya Wirosardjono maka Ali, dkk., (1990) juga menyatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan strata demikian maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat. (Saptono Iqbal, 2007)

Mengutip pendapatnya Wirosardjono maka Ali, dkk., (1990) juga menyatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan

strata demikian maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat.

Menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Ali, dkk., (1990) diberikan tiga gambaran umum gelandangan, yaitu (1) sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya, (2) orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan (3) orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan. Dengan mengutip definisi operasional Sensus Penduduk maka gelandangan terbatas pada mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, atau tempat tinggal tetapnya tidak berada pada wilayah pencacahan. Karena wilayah pencacahan telah habis membagi tempat hunian rumah tinggal yang lazim maka yang dimaksud dengan gelandangan dalam hal ini adalah orang-orang yang bermukim pada daerah-daerah bukan tempat tinggal tetapi merupakan konsentrasi hunian orang-orang seperti di bawah jembatan, kuburan, pinggiran sungai, sepanjang rel kereta api, taman, pasar, dan konsentrasi hunian gelandangan yang lain.

Pengertian gelandangan tersebut memberikan pengertian bahwa mereka termasuk golongan yang mempunyai kedudukan lebih terhormat daripada pengemis. Gelandangan pada umumnya mempunyai pekerjaan tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap

(berpindah-pindah). Sebaliknya pengemis hanya mengharapkan belas kasihan orang lain serta tidak tertutup kemungkinan golongan ini mempunyai tempat tinggal yang tetap. (Saptono Iqbali, 2007)

4. Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang. Ali, dkk,. (1990) menyatakan bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana (lelana). Sedangkan gelandangan pengemis adalah seorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis di muka umum.

Istilah “gepeng” merupakan singkatan dari kata gelandangan dan pengemis. Menurut Departemen Sosial R.I (1992), gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. (Saptono Iqbali, 2007)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha – usaha pembinaan. Usaha tersebut bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai warga negara Republik Indonesia.

Masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya terutama di Kota Makassar, hal ini dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, masalah urbanisasi serta masalah kecacatan menyebabkan banyak diantara mereka demi mempertahankan hidupnya dengan terpaksa menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan. (Perda Kota Makassar, 2009)

D. Tindak Pidana

1. Larangan (Delik Komisi)

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan, berupa pelanggaran terhadap larangan. Apabila

pembentuk undang-undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu, maka terciptalah ketentuan pidana yang mengancam perbuatan terhadap norma yang melarang menimbulkan delik komisi, contoh : pasal 362 KUHP tentang pencurian. (Mahrus A, 2011)

2. Perintah (Delik Omisi)

Delik omisi (*ommissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*), berupa pelanggaran terhadap perintah yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Delik Omisi merupakan kebalikan dari delik komisi dimana pembentuk Undang-Undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang mengharuskan suatu perbuatan, atau dalam kata lain adalah melanggar norma yang memerintahkan delik omisi. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan.

Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.
- 2) Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*)
Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan. (Andi Hamzah, 1994; 34)

3. Kejahatan

a. Pengertian

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Tentang definisi dari kejahatann itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana.

Pengertian kejahatan dapat ditinjau baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan

adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan dipandang sebagai suatu tindakan antisosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.

Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah: (Ninik W, Panji A, 1987; 1)

“suatu gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas”.

Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan

lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.(H.R. Abdussalam, 2006)

Ditinjau dari sosiologi, **Sutherland** menyelidiki bahwa kejahatan merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting yang bersumber dimasyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan tersebut, walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat. Kejahatan atau sifat jahat itu sendiri bukan karena pewarisan, tetapi karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu adalah berbeda-beda, yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri.(Edwin.H; 106)

Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma-norma masyarakat). **Soerjono Soekanto** merumuskan bahwa, deviasi adalah: (Soerjono S, 2002; 214)

“penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kaidah-kaidah timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan masyarakatnya”.

Pengertian penjahat dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya :
(A.Gumilang, 1993; 4)

Penjahat atau pelaku kejahatan ditinjau dari aspek yuridis merupakan seseorang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaran dan telah dijatuhi hukuman, dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana.

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, namun Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

b. Kejahatan menurut Para Ahli

1. Menurut M.v.T

Kejahatan (*rechterdeliten*) yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

2. R. Susilo

- Secara yuridis mengartikan kejahatan adalah sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang.
- Secara sosiologis mengartikan kejahatan adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

3. M. A. Elliat

Kejahatan adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bisa berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain.

4. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro

Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut

dihukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu adanya tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya. Selanjutnya J.E. Sahetapy, mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu penekanan belaka dari penguasa (pemerintah) yang dalam pelaksanaannya kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya merupakan perbuatan pidana atau bukan.

5. Mr. W. A. Bonger

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan.

6. Thorsten Sellin (1937)

Bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (conduct norms), karena konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif mana pun, serta tidak terkungkung oleh batas politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum pidana.

7. Paul W. Tappan (1947)

“An intentional act in violation of the criminal law (statutory or case law), committed without defence or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor.”

8. Sue Titus Reid (1979)

“Kejahatan itu adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dan pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat(*criminal intent/means rea*).

9. Sutherland

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

10. Richard Quinney

Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian, kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.

11. Howard Becker

Perilaku yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari penerapan cap/label terhadap perilaku tersebut.

12. Herman Mainhem

Perumusan tentang kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila terbukti.

13. Sellin

Untuk mempelajari kejahatan secara ilmiah perlu diperhatikan belenggu-belenggu yang diciptakan dalam hukum pidana.

14. Austin Turk

Sebagian besar orang yang melakukan perbuatan yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan pada penahanan atau penghubung yang tidak relevan untuk menjelaskan kejahatan, karena hanya merupakan cap/label penjahat itu semata.

15. Hasskel dan Yablonsky

Yang dinamakan dengan kejahatan adalah, yang tercatat dalam statistik; tak ada kesepakatan tentang perilaku anti sosial; sifat kejahatan dalam hukum pidana; hukum yang menyediakan perlindungan bagi seorang dari sigmatisasi yang tidak adil(Yesmil A.A, 2013;178-180)

Kejahatan merupakan suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum serta perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro dalam bukunya Paradoks Dalam Kriminologi menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamika serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan antisosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu(Herimanto, Winarmo, 2008). Dapat dikatakan bahwa kejahatan mencakup tujuh unsur, yaitu:

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat akibat yang merugikan.
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.

- f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atau keinginan sendiri.
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Selanjutnya dapat diuraikan tentang pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing :

- a. Pengertian secara praktis : Kita mengenal adanya beberapa jenis norma dalam masyarakat antara lain norma agama, kebiasaan, kesusilaan, dan norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan. Norma itu merupakan suatu garis untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang wajar pada satu pihak, sedang pada pihak lain adalah suatu perbuatan tercela. Perbuatan yang wajar pada sisi garis disebut dengan kebaikan dan kebalikannya yang diseberang garis disebut dengan kejahatan.
- b. Pengertian secara religius : mengidentikkan arti kejahatan dengan dosa. Setiap dosa diancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
- c. Pengertian dalam arti yuridis : misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun KUHP sendiri tidak membedakan dengan tegas antara kejahatan dan pelanggaran, tapi KUHP

memisahkan kejahatan dan pelanggaran dalam dua buku yang berbeda.

Menurut *Memorie van Toelichting* sebagai dasar dari pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah pembedaan antara *rechtsdelicten* (delik hukum) dan *wetsdelicten* (delik Undang-Undang). Pelanggaran termasuk dalam *wetsdelicten*, yaitu peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh Undang-undang sebagai suatu hal yang terlarang. Sedangkan kejahatan termasuk dalam *rechtsdelicten* (delik hukum), yaitu peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia dan terlepas dari Undang-Undang.

c. Latar Belakang dan Tipologi Kejahatan

Empat pendekatan yang pada dewasa ini masih ditempuh dalam menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan, adalah :

- a. Pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis.
- b. Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

- c. Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya proses-proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur didalam sistem budaya.
- d. Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri, pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan perilaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang.

Pengetahuan tentang tipologi penjahat, kejahatan, kriminalitas sangat diperlukan bagi usaha untuk merancang pola pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan kriminologi telah banyak dilakukan usaha untuk menggolongkan kejahatan dan penjahat dalam tipe-tipe tertentu. Karir penjahat dapat digolongkan ke dalam : penjahat biasa, penjahat berorganisasi dan penjahat profesional. *Penjahat biasa* adalah peringkat terendah dalam karir kriminal, mereka melakukan kejahatan konvensional mulai dari pencurian ringan sampai pencurian dengan kekerasan yang membutuhkan keterampilan terbatas, juga kurang mempunyai organisasi. *Penjahat*

terorganisasi umumnya mempunyai organisasi yang kuat dan dapat menghindari penyelidikan, serta mengkhususkan diri dalam bisnis ilegal berskala besar, kekuatan, kekerasan, intimidasi dan pemerasan digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan pengendalian atas kegiatan ekonomi diluar hukum. Adapun *penjahat profesional* lebih mempunyai kemahiran yang tinggi dan mampu menghasilkan kejahatan yang besar dan yang sulit diungkap oleh penegak hukum. Penjahat-penjahat jenis ini mengkhususkan diri dalam kejahatan-kejahatan yang lebih membutuhkan keterampilan daripada kekerasan. Kejahatan dapat digolongkan menjadi 8 tipe kejahatan yang didasarkan pada 4 karakteristik, yaitu :

- a. karir penjahat dari si pelanggar hukum.
- b. sejauh mana perilaku itu memperoleh dukungan kelompok.
- c. hubungan timbal balik antara kejahatan pola-pola perilaku yang sah.
- d. reaksi sosial terhadap kejahatan.

Tipe kejahatan itu adalah sebagai berikut :

- a. kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan, pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pernah melakukan kejahatan

tersebutsebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya.

- b. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas perbuatannya.
- c. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari.
- d. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan spionase, sabotase, dan sebagainya. Pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegal itu sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.
- e. Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal dan terbatas.

- f. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai part time-Career dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.
- g. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba dan sebagainya. Pelaku yang berasal dari eselon bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok penjahat, juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan para eselon atasnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan seringkali bertempat tinggal di lingkungan-lingkungan pemukiman yang baik.
- h. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka sering juga cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karir penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras.

Dengan mengembangkan suatu tipologi mengenai kejahatan dan penjahat, maka akan diperoleh gambaran yang lengkap dan cermat mengenai pelaku dan kejadiannya serta sejumlah ciri umum dari kejahatan dan penjahat yang lebih jauh dapat dipakai untuk menentukan teknik-teknik yang lebih membawa hasil dalam kerangka pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum.

4. Pelanggaran

a. Pengertian

Menurut M.v.T. memberikan batasan mengenai pelanggaran (*wetsdeliktern*) yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. (<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/delik-delik-khusus/>)

b. Pelanggaran Etik dan Pelanggran Hukum

1. Pelanggaran Etik

a. Pengertian Pelanggaran Etik

Etik berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti adat istiadat/kebiasaan yang baik. Perkembangan etik studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya.

b. Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Etik

Adapun beberapa hal yang membuat seseorang melanggar etik antara lain:

a. Kebutuhan Individu

Kebutuhan seringkali adalah hal utama yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelanggaran, misalnya seorang anak rela mencuri untuk mendapatkan uang demi untuk membayar uang tunggakan sekolah. Seorang bapak yang akhirnya tewas digebukin massa gara-gara mengambil susu dan beras di swalayan untuk menyambung hidup bayi dan istrinya. Karyawan sebuah pabrik yang bertindak anarkis, karena THR belum juga dibayarkan, padahal sudah melebihi jadwal yang ditentukan pemerintah, dan lain-lain.

b. Tidak Ada Pedoman

Ketika masyarakat dihadapkan pada persoalan yang belum jelas aturannya, maka mereka melakukan interpretasi sendiri atas persoalan yang dialami. Contohnya pembangunan rumah kumuh di pinggir rel kereta api, di bawah jembatan layang, di tanah kosong. Hal ini dikarenakan belum adanya perda ataupun ketentuan mengikat yang memberikan kejelasan bahwa daerah tersebut tidak boleh ditempati dan dibangun pemukiman liar. Sehingga masyarakat menginterpretasikan, bahwa lahan

kosong yang tidak digunakan boleh dibuat tempat tinggal, apalagi mereka bagian dari warga Negara. Sehingga pada saat tiba waktunya untuk membersihkan, maka sudah terlalu kompleks permasalahannya dan sulit dipecahkan.

c. Perilaku dan Kebiasaan Individu

kebiasaan yang terakumulasi dan tidak dikoreksi akan dapat menimbulkan pelanggaran. Contohnya; anggota DPR yang setiap menelurkan kebijakan selalu ada komisi atau uang tips, ataupun ada anggota yang tidur pada saat sidang berlangsung. Hal demikian ini salah dan keliru. Namun karena telah dilakukan bertahun-tahun, dan pelakunya hampir mayoritas, maka perilaku yang menyimpang tadi dianggap biasa, tidak ada masalah.

d. Lingkungan Yang Tidak Etis

Lingkungan yang memiliki daya dukung moral yang buruk, akan mampu membuat seseorang menjadi menyimpang perilakunya untuk tidak taat terhadap pedoman yang berlaku. Contohnya seorang residivis kambuhan, yang selalu keluar masuk penjara. Dalam penjara yang notabene merupakan tempat yang kurang baik, maka mempengaruhi pola pikir seseorang. Sehingga setiap kali dia masuk penjara, ketika keluar telah memiliki informasi, keahlian, ketrampilan yang baru untuk dapat menyempurnakan tindakan kejahannya.

e. Perilaku Orang yang Ditiru

Dalam hal ini, ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap etika, dapat juga karena dia mengimitasi tindakan orang yang dia pandang sebagai tauladan. Seorang anak yang setiap hari melihat ibunya dipukuli oleh bapaknya, maka bisa jadi pada saat dalam pergaulan, si anak cenderung kasar baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Dan itu semua dia dapatkan dari pengamatan di rumah yang dilakukan oleh bapaknya.

c. Contoh Pelanggaran Etik

Kebutuhan akan norma etik oleh manusia diwujudkan dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi. Rangkaian yang terhimpun ini biasa disebut kode etik. Kode etik merupakan bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Masyarakat profesi secara berkelompok membentuk kode etik profesi. Contohnya, kode etik guru, kode etik insinyur, kode etik wartawan dan sebagainya. Berisi ketentuan-ketentuan normatif etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan disisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan

segera jatuh tergregadasi menjadi sebuah pekerjaan pencairan nafkah biasa (*okupasi*) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealism, dan ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas di berikan kepada para elit professional tersebut.

Meskipun telah memiliki kode etik, masih banyak terjadi seseorang yang melanggar kode etik profesionalnya sendiri. Contohnya: seorang dokter melanggar kode etik dokter. Pelanggaran kode etik tidak akan mendapat sanksi lahiriah atau yang bersifat memaksa. Pelanggaran etik biasanya mendapat sanksi etik, seperti menyesal, rasa bersalah dan malu. Bila seorang profesi melanggar kode etik profesinya akan mendapat sanksi etik dari lembaga profesi, seperti teguran, dicabut keanggotaannya, atau tidak di perbolehkan lagi menjalani profesi tersebut. (Soerjono Soekanto, 2006)

d. Sanksi Pelanggaran Etik

1. Sanksi Sosial

Sanksi ini diberikan oleh masyarakat sendiri, tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan kejahatan kecil, ataupun pelanggaran yang dapat dimaafkan. Dengan demikian hukuman yang diterima akan ditentukan oleh masyarakat, misalnya membayar ganti rugi dsb,

pedoman yang digunakan adalah etika setempat berdasarkan keputusan bersama.

2. Sanksi Hukum

Sanksi ini diberikan oleh pihak berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian dan hakim. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukuman pidana ataupun perdata. Pedomannya suatu KUHP.

2. Pelanggaran Hukum

a. Pengertian Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan Negara, karena hukum oleh Negara dimuatkan dalam peraturan perundangan. Kasus tidak membawa SIM berarti melanggar peraturan, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas yang kemudian diperbaharui oleh DPR yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Perbedaan Pelanggaran Etik dan Pelanggaran Hukum

a. Pelanggaran Etik

Pelanggaran etik tidak akan mendapat sanksi lahiriah atau yang bersifat memaksa. Pelanggaran etik biasanya mendapat sanksi etik seperti menyesal, rasa bersalah dan malu. Contoh bila

seseorang profesi melanggar kode etik profesinya maka ia akan mendapat sanksi etik dari lembaga profesi, seperti teguran, di cabut keanggotaannya, atau tidak di perbolehkan lagi menjalani profesi tersebut.

- Sanksi Pelanggaran Etik

Sanksi ini diberikan oleh masyarakat sendiri, tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan kejahatan kecil, ataupun pelanggaran yang dapat dimaafkan. Dengan demikian hukuman yang diterima akan ditentukan oleh masyarakat, misalnya membayar ganti rugi dsb, pedoman yang digunakan adalah etika setempat berdasarkan keputusan bersama.

b. Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum berbeda dengan pelanggaran etik, sangsi pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari Negara yang bersifat lahiriah dan memaksa. Masyarakat secara resmi (Negara) berhak memberi sanksi bagi warga Negara yang melanggar hukum. Negara tidak berwenang menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran etik, kecuali pelanggaran itu sudah merupakan pelanggaran hukum. Kasus-kasus pelanggaran hukum banyak terjadi di masyarakat, mulai dari kasus kecil seperti pencurian dan perjudian sampai kasus besar seperti korupsi dan aksi teror.

Problem hukum yang lain adalah hukum dapat di gunakan sebagai alat kekuasaan. Dalam Negara, sesungguhnya hukumlah yang menjadi panglima. Semua institusi dan lembaga semua tunduk pada hukum yang berlaku.namun,dapat terjadi hukum dibuat justru untuk melayani kekuasaan dalam Negara.dengan alih-alih telah berdasarkan hukum,tetapi peraturan yang dibuat justru menyengsarakan rakyat,menciptakan ketidakadilan dan membusurkan KKN.

Contohnya, keppres-keppres yang dibuat pada masa lalu.Oleh karena itu,dalam membuat hukum harus memenuhi kaidah hukum.*Gustav radbruch* (ahli filsafat jerman) menyampaikan adanya tiga kaidah (ide besar) hkum yang harus dipenuhi dalam membuat norma hukum.ketiga kaidah itu adalah *gerechtigheit* (unsur keadilan),*zeckmaessigkeit* (unsur kemanfaatan),dan unsur *sicherheit* (unsur kepastian). Hukum yang berlaku disuatu Negara haruslah mampu memenuhi tiga kriteria itu.

- **Sanksi Pelanggaran Hukum**

Sanksi ini diberikan oleh pihak berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian dan hakim.Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukuman pidana ataupun perdata.Pedomannya suatu KUHP.

Adapun perbedaan yang paling mendasar antara pelanggaran etik dengan hukum adalah :

1. Etik berlaku untuk lingkungan profesi. Hukum berlaku untuk umum.
2. Etik disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. Hukum dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat.
3. Etik tidak seluruhnya tertulis. Hukum tercantum secara terinci dalam kitab Undang-Undang / lembaran negara.
4. Sanksi terhadap pelanggaran etik umumnya berupa tuntutan. Sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan.
5. Pelanggaran etik diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan kalau perlu diteruskan kepada Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etika Kedokteran (P3EK), yang dibentuk oleh Departemen Kesehatan (DepKes). Pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan.
6. Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik. Penyelesaian pelanggaran hukum memerlukan bukti fisik. Pelanggaran etik murni Pelanggaran terhadap butir-butir LSDI dan/atau KODEKI ada yang merupakan pelanggaran etik murni, dan ada pula yang merupakan pelanggaran etikolegal. Pelanggaran etik tidak selalu merupakan pelanggaran hukum, dan sebaliknya, pelanggaran hukum tidak selalu berarti pelanggaran etik.

4. Solusi dan Pencegahan Pelanggaran Etik dan Pelanggaran Hukum.

- a. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik dilingkungan masyarakat ataupun dinegara Indonesia.
- b. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, artinya bukan hanya sekedar dia tahu akan Undang-Undang misalnya tentang lalulintas, tetapi dia juga mengetahui isi daripada Undang-Undang lalulintas tersebut.
- c. Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum.
- d. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan-peraturan yang berlaku.
- e. Sosialisasi Undang-Undang dan Kode Etik yang di berlakukan.
- f. Adanya kesadaran hukum bagi setiap individu.
- g. Antara pelanggaran dan sanksinya harus seimbang agar menimbulkan efek jera bagi si pelanggar. (Priyanto, Sugeng, 2008)

BAB III

METODE PENELITIAN

E. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka penulis memiliki lokasi penelitian di Kota Makassar, yaitu Dinas Sosial kota Makassar dan di tempat-tempat ramai pengamen dan gelandangan serta pada Institusi Kepolisian yang ada di kota Makassar, pada khususnya yang menangani tentang pengamen dan gelandangan.

Penulis memilih lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, banyaknya populasi yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian.

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yakni data diperoleh melalui wawancara langsung pihak yang terlibat langsung dalam proses penelitian tersebut.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur,

dokumen-dokumen maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode penelitian pustaka (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data dan informasi yang bersumber dari literatur, surat kabar, hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang.

2. Metode penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang menjadi objek penelitian.

H. Analisis Data

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif, preskriptif yaitu penganalisisan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis, yaitu kajian

terhadap peraturan perundang-undangan. Dari analisis inilah ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Kondisi Umum Kota Makassar

Kota Makassar yang dahulu disebut Ujung Pandang adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, juga merupakan pusat pertumbuhan berbagai sektor dan pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi dan letak geografisnya (Selat Makassar), sehingga Kota Makassar memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan, distribusi dan akumulasi barang dan jasa yang ditunjang dengan sumber daya manusia, serta fasilitas pelayanan penunjang lainnya.

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Secara umum kota Makassar memiliki perbatasan dengan daerah disekitarnya antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². Wilayah Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan yang meliputi 143 kelurahan.

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar memberi penjelasan bahwa secara geografis Kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dengan hal itu maka Kota Makassar menjadi pusat dan pengembangan berbagai sektor kehidupan masyarakat di kawasan Timur Indonesia.

Sedangkan jumlah penduduk Kota Makassar menurut hasil sensus penduduk yang diadakan pada tahun 2013 tercatat sekitar 1.408.072 jiwa. Dimana

Persebaran penduduk di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Kota Makassar tahun 2013

Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk (%)
010	MARISO	56.578	4,02
020	MAMAJANG	58.087	4,13

030	TAMALATE	182.939	12,99
031	RAPPOCINI	156.665	11,13
040	MAKASSAR	81.054	5,76
050	UJUNG PANDANG	26.477	1,88
060	WAJO	27 .556	1,96
070	BONTOALA	52.611	3,74
080	UJUNG TANAH	46.836	3,33
090	TALLO	138.419	9,83
100	PANAKKUKANG	144.997	10,30
101	MANGGALA	130.943	9,30
110	BIRINGKANAYA	195.906	13,91
111	TAMALANREA	108.984	7,74
7371		1.408.072	100

Sumber data : BPS Kota Makassar

Berdasarkan pemaparan singkat diatas mengenai gambaran umum Kota Makassar yang merupakan kota strategis di Indonesia bagian timur dengan jumlah penduduk yang cukup banyak serta mobilitas dan perkembangan perekonomian dan pembangunan yang lagi berkembang maka memungkinkan banyak anak jalanan dan gelandangan yang tersebar. Proses mobilitas dan urbanisasi yang cepat menjadi salah satu faktor sehingga anak turun dijalanan menjadi anak jalanan maupun pengemis.

F. Data mengenai Pengemis dan Gelandangan

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kantor Dinas Sosial Kota Makassar, Satpol PP, Sekta IV serta penelitian langsung di jalanan, maka peneliti mendapatkan data mengenai jumlah anak jalanan dan pengemis serta data pembinaan anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang ada di kota Makassar dapat dilihat dari table sebagai berikut:

a. Data dari Dinas Sosial Kota Makassar

- Data tabel

Tabel 2. Menggambarkan Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Di Kota Makassar tahun 2013 Menurut Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Di Kota
Makassar tahun 2013

Kode Wilayah	Kecamatan	Gelandangan dan Pengemis	Anak jalanan
010	MARISO	27	162
020	MAMAJANG	13	126
030	TAMALATE	23	55
031	RAPPOCINI	17	74
040	MAKASSAR	32	147

050	UJUNG PANDANG	12	32
060	WAJO	11	45
070	BONTOALA	19	77
080	UJUNG TANAH	13	71
090	TALLO	26	32
100	PANAKKUKANG	42	133
101	MANGGALA	14	28
110	BIRINGKANAYA	13	27
111	TAMALANREA	43	34
	Jumlah	305	1.043
	2013	305	1.043
	2012	269	990
	2011	204	918
	2010	186	901
	2009	144	870
	2008	340	869
	2007	280	1.470

Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan Tabel di atas jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Makassar tahun 2007 sangat besar yakni 280 pengemis dan gelandangan. Kemudian mengalami kenaikan di tahun 2008 sebesar 340 pengemis dan gelandangan. Kemudian berkurang lagi menjadi 144 pengemis dan gelandangan. Walaupun diketahui bahwa jumlah

di tahun 2009 ini menurun drastis dibanding dari tahun 2007, angka 144 bukanlah angka yang sedikit.

Namun dalam 3 tahun terakhir sampai pada tahun 2013 keberadaan pengemis dan gelandangan mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni terdapat 305 pengemis dan gelandangan di tahun 2013. Peningkatan tersebut tersebar di 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, dengan persentase bahwa kecamatan dengan anak jalanan dan pengemis paling tinggi terdapat pada kecamatan tamalanrea dengan jumlah mencapai 43 pengemis dan gelandangan, Adapun untuk kecamatan dengan populasi anak jalanan terkecil adalah Kecamatan Wajo yakni dengan populasi sebesar 11 pengemis dan gelandangan.

Melihat data diatas dapat disimpulkan bahwa proses mengemis dan bergelandangan di kota Makassar memiliki peluang besar untuk terjadi, dengan melihat data pengemis dan gelandangan pada 3 tahun terakhir semakin meningkat setiap tahunnya.

Menurut pemaparan Dinas Sosial Kota Makassar bahwa penegakan Perda No.2 Tahun 2008 bagi gelandangan dan pengemis telah dilaksanakan, dengan cara melakukan rasia kepada gelandangan-gelandangan dan pengemis yang tersebar lalu diberikan pembinaan. Pembinaan tersebut berupa pengajaran dan pengembangan bakat dan keahliannya masing-masing seperti

menjahit, menyanyi, melukis, dll. Pembinaan lainnya diatur dalam Perda No.2 Tahun 2008 BAB VI Pasal 51.

Dinas sosial juga menjelaskan tentang sanksi yang diberikan kepada pengemis dan gelandangan yang diatur dalam Perda No.2 Tahun 2008 BAB VI Pasal 51 yaitu :

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi gelandangan dan pengemis;
- (2) Gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas pengemis usia produktif 18 – 59 tahun dan pengemis usia lanjut 60 tahun ke atas;
- (3) Pembinaan bagi gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis dan/atau melakukan kegiatan ekonomi di tempat umum yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan;
- (4) Setiap gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang ditemukan di tempat umum yang melakukan kegiatan mengemis akan dikenakan hukuman pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial selama 10 (sepuluh) hari;
- (5) Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berupa :
 - a. pembinaan dan pengendalian dilakukan untuk menghalangi mereka agar tidak turun ketempat umum yang dilakukan oleh petugas;

- b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya di rehabilitasi;
 - c. pengembalian dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang berasal dari daerah lain;
 - d. bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c kemudian selanjutnya masih didapati melakukan aktifitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (6) Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia lanjut sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berupa :
- a. pembinaan dengan cara menghalangi mereka agar tidak turun ke tempat umum yang dilakukan oleh petugas;
 - b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan aktifitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya di rehabilitasi seumur hidup dalam sistem panti sosial (Panti jompo).

Sanksi yang diberikan kepada pengemis dan gelandangan dilakukan berdasarkan acuan dari Perda No.2 Tahun 2008 BAB VI Pasal 51 diatas. Sanksi tersebut telah diterapkan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Perda dalam menaggulangi gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Makassar.

Menurut hasil wawancara Penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Makassar, Dalam hal ini KASI PEM. ANJAL, GEPENG,

PENGAMEN, Nurharsyah, S.H yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2015 di kantor Dinas Sosial Kota Makassar, bahwa:

“Penegak Perda adalah Satpol PP, kita adalah instansi tehnik membina dari hasil pendataan tangkapan Satpol PP, ketika penangkapan telah selesai maka tangkapan tersebut dibuatkan data kemudian di bina, karena kita belum memiliki ‘Rumah Singgah’ , di Jakarta sudah memiliki 7 buah Rumah Singgah. Kecuali untuk anak-anak yang memang tidak memiliki tempat tinggal dan orang tua yang tidak mampu akan dibawa ke Panti Asuhan. Kita memiliki jadwal jalan untuk Patroli, dalam sebulan kita melakukan sebanyak 6-7 kali patroli, bahkan setiap hari ketika banyak didapatkan berita mengenai pengemis dan gelandangan yang beredar. Gelandangan dan pengemis yang dimaksud dalam Perda tersebut adalah mereka yang mengemis dan bergelandangan di “lampu-lampu lalu-lintas” ”

b. Data dari Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut pemaparan Satpol PP kota Makassar bahwa dalam melaksanakan dan menegakkan Perda No.2 Tahun 2008 tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan di kota Makassar dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja kota Makassar memiliki 2 peran, yaitu peran preventif yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan serta peran represif yang dilakukan dengan cara razia serta melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, Dinas Sosial dan pihak lainnya yang terkait dalam memberantas sindikat pengemis dan gelandangan dalam wilayah kota Makassar.

Satpol PP melakukan rasia setiap saat apabila disinyalir atau diduga terjadi kegiatan mengemis dan bergelandangan di suatu tempat tertentu. Satpol PP juga melakukan patroli dan pengawasan terhadap keberadaan pengemis dan gelandangan bersama pihak kepolisian serta Dinas Sosial kota Makassar.

Masih banyaknya pengemis dan gelandangan di kota Makassar disebabkan karena belum adanya penerapan sanksi yang tegas yang diatur dalam Perda yang dapat membuat efek jera terhadap pelaku pengemis dan gelandangan di Kota Makassar.

c. Data dari Sekta Makassar (04)

Menurut pemaparan pihak kepolisian di Sekta Makassar (04) bahwa dalam melaksanakan dan menegakkan Perda No.2 Tahun 2008 tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan di Kota Makassar dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban umum Polri mempunyai 2 peran, yaitu peran preventif yang dilakukan dengan cara himbauan, penyuluhan dengan mengedepankan fungsi Bimnas guna menekankan atau meminimalisir para pelaku yang ada di Kota Makassar serta peran represif yang dilakukan dengan cara rasia apabila ada permintaan dari Dinas Sosial Kota Makassar untuk mem *back up* penertiban pengemis dan gelandangan yang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja guna

mencegah terjadinya tindakan kriminal yang akan terjadi saat pelaksanaan rasia.

Menurut pihak kepolisian, banyaknya pengemis dan gelandangan yang berada di Kota Makassar dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah Kota Makassar serta faktor ekonomi dan dikarenakan belum adanya penerapan sanksi yang tegas yang dapat membuat efek jera terhadap para pengemis dan gelandangan di Kota Makassar.

d. Data dari Pengemis dan Gelandangan yang ada di Kota Makassar

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa pengamen dan gelandangan yang tersebar di kota Makassar dapat disimpulkan bahwa mereka sering tertangkap oleh Satpol PP dan kemudian di bina oleh Dinas Sosial sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka masing-masing, beberapa dari mereka memanfaatkan hal itu dengan baik sehingga dapat mencari uang dengan tanpa mengemis dan bergelandangan. Masih banyaknya pengemis dan bergelandangan di Kota Makassar karena banyak dari mereka yang tidak memanfaatkan pembinaan tersebut dengan baik karena cenderung ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan mudah tanpa harus menggunakan banyak tenaga.

G. Keefektivan Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2008 tentang larangan mengemis dan bergelandangan di kota Makassar

Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2008 tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan di Kota Makassar dilihat dari cara dan proses penegakan Perda tersebut. Apakah cara yang dilakukan sesuai dengan prosedur serta target yang diinginkan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam pelaksanaan Perda tersebut, sudah dilakukan tindakan berupa Patroli setiap 6-7 kali sebulan serta rasia sebanyak yang dibutuhkan dalam penangkapan pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Makassar. Pelaksanaan Perda tersebut ditegakkan oleh Satpol PP dengan *back up-an* dari Polri dengan perintah yang diberikan oleh Dinas Sosial kota Makassar.

Walaupun dari data yang didapatkan bahwa pengemis dan gelandangan dalam 3 tahun terakhir terus meningkat, tidak berarti bahwa pelaksanaan Perda tersebut tidak efektif, karena dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak Dinas Sosial bahwa :

“Pengemis dan gelandangan yang kami data dan diberikan pembinaan terkadang tidak memanfaatkan pembinaan tersebut dengan baik karena mereka cenderung ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat (*instant*), kembalinya pengemis dan gelandangan ke tempat semula mereka untuk melakukan pengemisan dan bergelandangan dikarenakan tidak efektifnya pelaksanaan dari Perda No.2 Tahun 2008 pasal 49 ayat 1 tentang larangan untuk memberi uang kepada pengemis , gelandangan ,

serta anak jalanan. Dengan artian , ketika tidak ada yang memberi , maka tidak akan ada yang menerima”

Dari penjelasan diatas menegaskan bahwa pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2008 pasal 46 tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan di Kota Makassar sudah efektif, dilihat dari penegakan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang bersangkutan seperti Satpol PP dan Polri .

H. Peran Pihak Kepolisian dalam menangani pengemis dan gelandangan

Polisi merupakan aparat keamanan yang menjadi pelaksana dalam menangani pengemis dan gelandangan. Polisi-polisi yang berperan dalam menegakkan Perda adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Satuan Polisi Republik Indonesia.

Satpol PP berperan sebagai penegak Perda yang salah satu Pasalnya mengatur tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan. Satpol PP memiliki dua peran , yaitu peran preventif yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan serta peran represif yang dilakukan dengan cara razia serta melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, Dinas Sosial dan pihak lainnya yang terkait dalam memberantas sindikat pengemis dan gelandangan dalam wilayah kota Makassar.

Satuan Polisi Republik Indonesia (Polri) juga berperan sebagai penegak Perda, tetapi polisi ditugaskan untuk mem back-up

kegiatan dari Satpol PP dalam menangani pengemis dan gelandangan guna mencegah terjadinya tindakan kriminal yang akan terjadi saat pelaksanaan razia. Selain itu, Polri memiliki dua peran yang sama dengan Satpol PP, yaitu peran preventif yang dilakukan dengan cara himbauan, penyuluhan dengan mengedepankan fungsi Bimnas guna menekankan atau meminimalisir para pelaku yang ada di Kota Makassar serta peran represif yang dilakukan dengan cara razia apabila ada permintaan dari Dinas Sosial Kota Makassar untuk mem *back up* penertiban pengemis dan gelandangan yang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja guna mencegah terjadinya tindakan kriminal yang akan terjadi saat pelaksanaan razia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Perda No.2 Tahun 2008 tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan di Kota Makassar sudah efektif dengan terlaksananya patroli yang dilakukan oleh Satpol PP dengan *back-up* an dari pihak Kepolisian yang memiliki peran penting dalam menegakkan Perda Kota Makassar. Keefektifan dari Perda tersebut juga dapat dilihat dari penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Polri dengan cara Patroli dan Rasia lalu dilakukan pendataan yang kemudian akan diberi pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa pengembangan diri sesuai bakat dan keinginannya masing-masing sehingga pengemis dan gelandangan yang ada di kota Makassar dapat mengembangkan bakatnya untuk mencari penghasilan tanpa mengemis.
- b. Peran dari pihak kepolisan dalam pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2008 pasal 46 tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan terbagi dua , yaitu peran preventif dan represif

yang dilakukan oleh Satpol PP dan Polri , Satpol PP dan Polri memiliki peran preventif yang sama berupa himbauan, sosialisasi dan penyuluhan sedangkan dalam peran represif Satpol PP melakukan razia serta melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, Dinas Sosial dan pihak lainnya yang terkait dalam memberantas sindikat pengemis dan gelandangan dalam wilayah kota Makassar sedangkan Polri mem *back up* penertiban pengemis dan gelandangan yang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja guna mencegah terjadinya tindakan kriminal yang akan terjadi saat pelaksanaan razia.

B. Saran

Dengan melihat banyaknya faktor penyebab pengemis dan gelandangan yang berada di kota Makassar semakin bertambah setiap tahunnya, maka hendaknya sedini mungkin pemerintah mengefektifkan pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2008 pasal 49 ayat 1 tentang larangan untuk memberi uang atau barang kepada pengemis, gelandangan ,maupun anak jalanan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi populasi pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Makassar serta untuk lebih mengefektifkan Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2008 pasal 46 tentang larangan untuk mengemis dan bergelandangan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Achmad Ali, ***Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)***. Jakarta: Kencana, 2010.

A Gumilang, ***Kriminalistik***, Bandung: Angkasa, 1993. Hal. 4.

Andi Hamzah, ***Azas-Azas Hukum Pidana***. 1993.

Edwin H, Sutherland, ***Azas-Azas Kriminologi***, Bandung, Hal. 106.

E. Utrecht, ***Pengantar dalam Hukum Indonesia***. Djakarta: P.T. Penerbitan dan Balai Buku Ihtiar, 1961.

Herimanto, Winarno, ***Ilmu Sosial dan Budaya Dasar***. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

H. R. Abdussalam, ***Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II***, Jakarta: Restu Agung, 2006.

Kansil, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

L.J van Apeldoorn, ***Pengantar Ilmu Hukum***. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Ninik Widiyanti, Panji Anogara, ***Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya***, Jakarta: Pradya Paramita, 1978. Hal. 1.

Nungkei Feriustika Kesumawindayati, Chalid Sahuri, 2011. ***Strategi Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru***.

Priyanto,Sugeng, ***Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas VIII.***

Jakarta:Pusat Perbukuan,DEPDiknas, 2008.

Saptono Iqbali, ***Studi Kasus Gelandangan-Pengemis (Gepeng) di***

Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, 2007.

Satjipto R. ***Hukum dan Perilaku.*** Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

2009.

Soerjono Soekanto, ***Sosiologi Suatu Pengantar,*** Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2002. Hal. 214.

----- ***Sosiologi.*** Jakarta:Grafindo Persada, 2006.

Solahuddin, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara***

Pidana&Perdata(KUHP,KUHAP,KUHAPdt), Jakarta:

Visimedia, 2008.

Sudikno Mertokusumo, ***Mengenal Hukum:Suatu Pengantar.*** Yogyakarta:

Liberty, 1999.

Suharso, A. Retnoningsih, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux.***

Semarang: Widya Karya.

Yesmil A.A, ***Kriminologi.*** Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

Sumber Lain

Makassar in Figures 2007. Makassar:Badan Pusat Statistik kota

Makassar, 2008.

**Peraturan Daerah Kota Makassar No.2 Tahun 2008 tentang
Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan
pengamen di Kota Makassar, 2009.**

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/delik-delik-khusus/>

[\\Server\(f\)\Studio\2004\Profilkota\Aplikasi\LaporanProfil\7371_makassar.doc](\\Server(f)\Studio\2004\Profilkota\Aplikasi\LaporanProfil\7371_makassar.doc)

[\(http://niasonline.net/\)](http://niasonline.net/)